

**ANALISIS PRINSIP GCG DAN PENERAPAN PSAK 109 TENTANG
AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH PADA LAZISMU
(LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH MUHAMMADIYAH)
MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak)

Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

ADITYA CHANDRA MEINALDY

NIM : 10800113054

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Siti Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 SamataSungguminasa - GowaTlp. 841879 Fax. 8221400

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Prinsip GCG dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah) Makassar” yang disusun oleh Aditya Chandra Meinaldy, NIM: 10800113054, mahasiswa Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 20 Februari 2020, bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

Makassar, 29 Februari 2020 M.

4 Rajab 1441 H.

DEWAN PENGUJI :

Ketua : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.
Munaqisy I : Jamaluddin M, S.E., M.Si.
Munaqisy II : Andi Wawo, S.E., M.Acc.
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
Pembimbing II : Memen Suwandi, SE., M.Si.

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Abustanillyas, M.Ag
NIP. 19661130 199303 1 003

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis persembahkan keharibaan Allah Rabbul Alamin, zat yang menurut Al-Qur'an kepada yang tidak diragukan sedikitpun ajaran yang dikandungnya, yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya dan dengan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan Salam kepada rasulullah Muhammad SAW. yang merupakan rahmat Lil Alamin yang mengeluarkan manusia dari lumpur jahiliyah, menuju kepada peradaban yang Islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi obor bagi perjalanan hidup manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat.

Skripsi dengan judul ***"Analisis Implementasi Gcg Dan Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Lazismu (Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sedekah Muhammadiyah) Makassar"*** penulis hadirkan sebagai salah satu perasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Sejak awal terlintas dalam pikiran penulis akan adanya hambatan dan rintangan, namun dengan adanya bantuan moril maupun materil dari segenap pihak yang telah membantu memudahkan langkah penulis. Menyadari hal tersebut, maka penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Mustafa dan Ibunda Suryani yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis.

Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Bapak Prof.H. Hamdan, M.A., selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, III dan IV UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag., selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

3. Bapak Memen Suwandi SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan dan Ibu Lince Bulutoding SE., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar sekaligus sebagai Penasihat Akademik yang selalu memberikan nasihat.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Memen Suwandi SE., M.Si., selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
5. Bapak Jamaluddin M. SE.,M.Si., selaku penguji I dan Bapak Andi Wawo, SE.,M,Sc.,Ak., selaku penguji II yang dengan ikhlas memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
7. Seluruh staf akademik, dan tata usaha, serta staf jurusan Akuntansi UIN alauddin Makassar.
8. Kepada calon istri saya Rika Musriani dan calon ibu Mertua saya ibu suryani. Terima kasih karena selama ini selalu menemani saya, menyemangati, memberikan motivasi agar saya dapat menjadi seorang sarjana
9. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2013 terkhusus untuk Akuntansi B dan seluruh mahasiswa jurusan akuntansi UIN Alauddin Makassar terima

kasih atas segala motivasi dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini dan telah menjadi teman yang hebat bagi penulis.

10. Semua keluarga, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai upaya maksimal dan memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarja Akuntansi pada UIN Alauddin Makassar dan semoga skripsi yang penulis persembahkan ini bermanfaat adanya, aamiin. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tentu datangnya dari penulis. Kiranya dengan semakin bertambahnya wawasan dan pengetahuan, kita semakin menyadari bahwa Allah adalah sumber segala sumber ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Penulis,
ALAUDDIN
M A K A S S A R **Aditya Chandra Meinaldy**
10800113054

DAFTAR ISI

JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1-11
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Penelitian Terdahulu	7
D. Tujuan	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II : TINJAUAN TEORITIS.....	12-32
A. <i>Syariah Enterprise Theory</i>	12
B. <i>Theory Stewardship</i>	13
C. <i>Good Corporate Governance</i>	14
D. Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK 109)	17
E. Organisasi Pengelola Zakat	20
F. Akuntansi Zakat	22
G. <i>Zakat</i>	25
H. <i>Infraq</i>	28

I. Sedekah	29
J. Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Menerapkan Akuntansi Zakat PSAK 109	30
K. Kerangka Pikir	32
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	33-41
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian	35
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Metode Analisis Data	37
F. Uji Keabsahan Data	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40-76
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	40
B. Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah LAZISMU Makassar	52
C. Analisis Akuntansi Dana Zakat, Infaq dan Sedekah LAZISMU Makassar	61
D. Prinsip Good Corporate Governance Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Makassar .	72
BAB V : PENUTUP	76-78
A. Kesimpulan	76

B. Saran dan Implikasi Penelitian	77
---	----

DAFTAR PUSTAKA.	79-82
-----------------------------	-------

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



Nama : Aditya Chandra Meinaldy
Nim : 10800113054
Judul : Analisis Prinsip GCG Dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Lazismu (Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sedekah Muhammadiyah) Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip GCG dan PSAK 109. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang atau fenomena yang diamati, dengan pendekatan studi kasus dimana data dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikaji dengan menggunakan ayat Al-Qur'an di dalamnya.

Adapun hasil dari penelitian ini menemukan bahwa LAZISMU Makassar sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan infak/sedekah. Proses penyusunan laporan keuangan di LAZISMU Makassar tidak melakukan penjurnalan, hanya melakukan beberapa pencatatan pembukuan dengan merincikannya sebagai akun penerimaan atau akun pengeluaran. Pembukuan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat menggunakan sistem *single entry* memiliki kelebihan dan kelemahan yakni pencatatan ini dianggap mudah dan cukup sederhana serta mudah untuk dipahami, namun tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap serta sulit menemukan kesalahan dalam pencatatan dan sulit untuk dikontrol. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di LAZISMU Makassar telah menerapkan kelima prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik.

Kata kunci : Akuntansi, Zakat, Good Corporate Governance, PSAK 109.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan beragam suku, budaya, dan agama. Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim yang besar. Dengan keunggulan ini secara otomatis Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar pula yang kemudian mendorong berdirinya lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi nirlaba seperti perbankan syariah dan entitas-entitas lainnya seperti organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah.

Besarnya jumlah penduduk muslim dan wajibnya hukum melaksanakan zakat, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah potensi zakat yang besar. Peningkatan jumlah zakat diakibatkan karena semakin meningkatnya jumlah muzakki yang membayar zakat. Dalam *outlook* zakat Indonesia (2017), disebutkan bahwa peningkatan jumlah *muzakki* secara umum lebih dominan dipengaruhi oleh *muzakki* perorangan. Sementara itu, *muzakki* lembaga tidak menunjukkan peningkatan yang berarti.

Organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah adalah organisasi yang bergerak dalam bidang penerimaan dan pendistribusian dana zakat infaq dan sedekah. Dana yang dikelola oleh organisasi ini berasal dari orang Islam yang berkewajiban membayar zakat (*Muzakki*). Tujuan dibentuknya organisasi pengelola zakat, infaq

dansedekah ini tidak lain untuk membantu sesama umat muslim dan juga sebagai salah satu sarana ibadah untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.

Puspitasari dan Habiburrochman (2013) menyatakan bahwa terdapat tiga pihak yang harus bersinergi, agar fungsi zakat dan pemanfaatannya dapat dioptimalkan yaitu *muzakki* (pembayar zakat), *mustahik* (penerima zakat) dan *amil* (pengelola zakat). Sedangkan pelaksanaan zakat bergantung pada dua faktor, yaitu:

Pertama, faktor eksternal yaitu pengawasan pemerintah dan juga masyarakat islam. Kedua faktor internal yaitu dorongan hati nurani seorang muslim yang bersumber dari keimanan mereka terhadap Islam (Sumadi, 2017).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yaitu pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan tujuan akuntansi syariah. Akuntansi syariah memiliki dua tujuan utama. Pertama, sebagai instrumen pertanggungjawaban memenuhi kewajiban kepada Allah, individu dan lingkungan masyarakat. Kedua, sebagai instrumen membantu terciptanya keadilan sosial ekonomi seperti dikehendaki dalam ekonomi Islam (Asrori dan Pujiyanto, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang dilaksanakan oleh BAZNAS dan LAZ. Undang-undang mewajibkan organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah memberikan laporan secara berkala. Keberadaan Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari *Muzakki* diserahkan langsung kepada *Mustahik*, akan tetapi dilakukan

oleh sebuah lembaga yang khusus menaungi masalah tersebut yakni organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah (Hanifah dan Ram,2014).

Organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah baik Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan seluruh pelaksanaan mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan sampai pada pelaporan keuangannya. Pentingnya pencatatan atas pengelolaan keuangan dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat (282) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulisnya”. (Departemen Agama RI, 2013)

Dari ayat diatas jika dikaitkan dengan pengelola zakat maka sebagai salahsatu organisasi swadaya masyarakat organisasi pengelola zakat, infaq, dan sedekah sebagai organisasi yang menghimpun dan menyalurkan zakat sudah seharusnya membuat pencatatan dalam bentuk laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang dikelola. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang menggunakan jasanya percaya bahwa dana yang dititipkan tersebut

dikeloladengan baik, karena dana-dana tersebut merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan (Salle, 2015).

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi sektor publik tentu saja memiliki *stakeholder* yang sangat luas. Konsekuensinya, Badan Amil Zakat sangat dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan dananya kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka, seimbang, dan merata kepada *stakeholders* terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksebilitas lembaga (Shahnaz, 2016).

Pengelolaan zakat harus mengacu pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam GCG, diantaranya: *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Dalam pengelolaan zakat yang termasuk di dalamnya pengelolaan infaq/sedekah. Keempat komponen tersebut dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan membantupengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.

Sejak 2008 ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah telah dibuat oleh IAI. Pada tahun 2010 tepatnya tanggal 6 April PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah telah disahkan dan dinikmati publik pada oktober 2011. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariah Islam dan untuk meningkatkan keseragaman laporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan *Good Governance*

yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness dan independency*. (Utomo, 2007:14).

Untuk mencapai hal tersebut maka organisasi pengelola zakat harus menaati aturan yang telah dibuat dengan menetapkan standar akuntansi zakat. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini adalah pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam standar akuntansi keuangan PSAK No 109 serta tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah. Karena semakin baik aturan yang dibuat maka akan semakin baik pula hasil yang akan dicapai.

Namun dewasa ini permasalahan muncul terkait penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat. Tidak semua Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat memahami pengaplikasian aturan tersebut pada proses pelaporan keuangannya. Diantara permasalahan yang dominan muncul adalah pengakuan akuntansi dengan metode cash basis, penggabungan dana zakat dan dana non zakat menjadi satu dalam pelaporan keuangannya, serta tidak dibuatnya laporan keuangan yang lengkap sesuai yang disyaratkan dalam PSAK. Menurut Cahyadi (2014) ketidakpahaman Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat mengenai pembagian porsi dana zakat dan dana amil, dan bahkan terdapat Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat yang belum memahami mengenai pelaporan keuangan yang wajib dipublikasikan.

Masih banyak organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah yang belum menerapkan pencatatan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang terdapat

dalam PSAK No. 109. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas hal yang serupa. Salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional di Indonesia yang berperan dalam pengelolaan dana zakat secara profesional adalah LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah) yang didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. Lazismu sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

LAZISMU Makassar merupakan salah satu cabang LAZISMU yang berada di wilayah Makassar. Organisasi ini merupakan organisasi nirlaba yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa. LAZISMU Makassar mengelola dana yang bersumber dari *Muzakkidi* berbagai wilayah di Sulawesi Selatan sehingga dana yang mereka kelola cukup besar. Berdasarkan proyeksi dan target penghimpunan LAZISMU secara nasional, dana yang ditargetkan pada LAZISMU Sulawesi Selatan pada tahun 2019 sekitar Rp 3,500,000,000. Dengan besarnya dana yang akan dikelola maka perlu adanya penerapan prinsip GCG, peningkatan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban atas dana tersebut agar masyarakat yang menggunakan jasanya percaya akan dana yang mereka titipkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini yang berhubungan dengan penerapan PSAK 109 sebagai bentuk upaya perwujudan *Good Corporate Governance*, yaitu:

1. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah berdasarkan PSAK 109 pada LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah) Makassar?
2. Bagaimana prinsip GCG pada LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah) Makassar?

C. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian dengan masalah serupa diantaranya: Penelitian yang dilakukan oleh Rina (2013) dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodakoh pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat (LAZ DPU) di Samarinda yang bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shodakoh dengan mengacu pada PSAK nomor 109. Hasil penelitian ditemukan bahwa Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat (LAZ DPU) Samarinda belum menjurnal pada saat pengakuan awal penerimaan dan pengeluaran dana, neraca 31 desember yang disajikan hanya terlihat nilai nominal dari seluruh penerimaan dan pengeluaran, tidak melakukan pengungkapan atas asset kelola dan belum mencatat transaksi nonkas dalam

perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK nomor 109 dalam penyajian laporan keuangan dana zakat infaq dan shodakoh.

Penelitian yang dilakukan oleh Istutik (2013) dengan judul Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK:109) pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. Hasil penelitian ditemukan bahwa semua lembaga amil yang diteliti telah melakukan pertanggung jawaban atas dana ZIS yang diterima dan disalurkan. Namun bentuk dan komponen laporan keuangan yang disusun dari kelima lembaga amil tersebut tidak mencerminkan hasil implementasi standar akuntansi ZIS (PSAK 109). Laporan keuangan yang disusun hanya untuk memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dengan menyebutnya laporan penerimaan dan pengeluaran kas, bukan laporan arus kas yang diatur dalam PSAK.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Kholifah (2014) dengan judul Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (Studi Kasus pada BAZIS DKI Jakarta). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan No. 109 mengenai penyajian laporan keuangan dana ZIS ini diterapkan oleh badan amil zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan pernyataan standar akuntansi keuangan No. 109 bagi badan amil zakat dan lembaga amil zakat di DKI Jakarta dirasa cukup besar manfaatnya. Berdasarkan pernyataan bahwa laporan keuangan BAZIS DKI Jakarta 100% telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan No. 109.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggaraeni dkk, (2015) dengan judul Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat

Kota Bitung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui laporan keuangan BAZNAS Kota Bitung tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah sudah sesuai dengan PSAK 109. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bitung belum menerapkan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rina Indrayani (2013)	Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Shodakoh Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) di Samarinda.	Belum sesuai dengan PSAK 109
2	Istutik (2013)	Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK : 109) Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang.	Belum sesuai dengan PSAK 109
3	Siti Kholifah (2014)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (Studi Kasus Pada BAZIS DKI Jakarta).	Sudah sesuai dengan PSAK 109
4	Anggaraeni dkk (2015)	Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Kota Bitung.	Belum sesuai dengan PSAK 109
5	Shahnaz (2016)	Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.	Belum sesuai dengan PSAK 109
6	Salman Al Parizi (2017)	Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK 109) Pada LKN PKPU Cabang Kendari.	Sudah sesuai dengan PSAK 109

D. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui prinsip GCG pada LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah) Makassar.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan atas pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat pada LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah) Makassar.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan berdasarkan tujuan penelitian diatas adalah:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini menjelaskan bahwa *Shariah Enterprise Theory* memiliki kepedulian yang besar terhadap stakeholders yang luas , seperti Tuhan, manusia dan alam. Sehingga pengelolaan zakat menjadi ukuran kinerja materi dan spiritual. Bentuk implementasi terhadap Allah dapat dianggap sebagai upaya LAZ untuk memenuhi prinsip syariah yang dilihat melalui adanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang keagamaan. Adapun Teori *Stewardship* menjelaskan bahwa manajer organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah dalam mengimplementasikan akuntansi zakat tidak berdasarkan kemauannya sendiri.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi organisasi pengelola zakat yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Makassar dengan penerapan Akuntansi Zakat PSAK 109 untuk dapat menjadikan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai standar utama pelaporan zakatnya. Penelitian ini diharapkan mampu dalam pemulihan kepercayaan para pembayar zakat (muzakki) guna mempercayakan zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Syariah Enterprise Theory (SET)

Syariah Enterprise theory merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban terhadap pemilik perusahaan dan *stakeholders*. Teori ini merupakan pengembangan dari *Enterprise Theory* yang telah dimasukkan nilai-nilai Islam agar dapat menghasilkan teori yang bersifat humanis dan transendental. Menurut Triyuwono (2012) konsep *Enterprise Theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan, melainkan berada pada banyak tangan, yaitu *stakeholder*. Oleh karena itu *enterprise theory* direkomendasikan untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja. Tetapi, dalam konsep syariah belum mengakui adanya partner tidak langsung yang memberikan kontribusi ekonomi karena partner tidak langsung ini mempunyai hak atas nilai tambah yang telah diperoleh perusahaan.

Syariah enterprise theory memang tepat jika diterapkan dalam akuntansi syariah karena mengandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, kepercayaan dan akuntabilitas. *Syariah enterprise theory* merupakan sebuah teori bagi perusahaan yang telah dipadukan dengan nilai ketuhanan. Hal paling penting dalam *Syariah enterprise theory* adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari semua sumber daya yang ada di dunia. Sementara harta yang dimiliki oleh para *stakeholder*

merupakan amanah dari Allah SWT sehingga di dalamnya juga mencakup tanggung jawab untuk menggunakan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT (Wahyuni, 2013). Hubungannya dengan Badan Amil Zakat sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi.

B. Theory Stewardship

Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991) menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori *stewardship* dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun *shareholders* pada khususnya (Achmad, 2005).

Teori *stewardship* menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi *utilitas principals* dan manajemen. *Theory stewardship* menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk

kepentingan organisasi. Teori *Stewardship* digunakan untuk menjelaskan bahwa manajer organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah dalam mengimplementasikan akuntansi zakat tidak berdasarkan kemauannya sendiri (Pujianto dan Asrori, 2015).

Teori *Stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga fungsi utilitas akan maksimal (Waliyyani dan Mahmud, 2015). Sehingga yang menjadi dasar dalam pemakaian akuntansi zakat adalah adanya keputusan dari pihak manajer sebagai pengelola utama organisasi.

C. *Good Corporate Governance*(GCG)

Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi sebuah istilah dan gerakan dan menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Konsep *Corporate Governance* yang komperenhensif mulai berkembang sejak kejadian *The New York Stock Exchange Crash* pada tanggal 19 Oktober 1987 dimana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat di Bursa Efek NewYork, mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Sejak terbitnya *Cadbury Code on Corporate Governance* pada Tahun 1992, semakin banyak intitusi yang melakukan penyempurnaan dalam prinsip-prinsip dan petunjuk teknis praktik *Good Corporate Governance*. Pola *Good Corporate Governance* kemudian diikuti oleh Negara-negara di Eropa hingga seluruh dunia.

Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan

stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Sebagai sebuah konsep yang makin populer, GCG ternyata tidak memiliki definisi tunggal. Dikalangan bisnis, istilah GCG diartikan tata kelola perusahaan. Beberapa negara mendefinisikan GCG dengan pengertian yang agak mirip walaupun ada sedikit perbedaan istilah. Ristifani (2009) menyatakan bahwa Dua teori utama yang terkait dengan *Corporate Governance* adalah *Stewardship Theory* dan *Agency Theory*. *Stewardship Theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yaitu bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *good corporate governance* pada umumnya di Indonesia.

a. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Daniri (2005) prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) adalah tata kelola suatu lembaga atau perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparancy*).
2. Akuntabilitas (*Accountability*).
3. Responsibilitas (*Responsibility*).
4. Independensi (*Independency*).

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*).

Prinsip keterbukaan (*transparancy*) dimaksudkan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan dan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas (*accountability*) dalam suatu lembaga adalah kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban organisasi atau lembaga, sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Sedangkan pertanggungjawaban (*responsibility*) merupakan kesesuaian pengelolaan lembaga/organisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan lembaga/organisasi yang sehat. Independensi (*independency*) adalah pengelolaan lembaga/organisasi secara profesional tanpa adanya pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun. Kewajaran (*fairness*) adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi suatu keniscayaan bagi sebuah institusi atau lembaga termasuk di dalamnya organisasi pengelolaan zakat. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik (*public accountability*) yang berkaitan dengan kegiatan operasional lembaga/organisasi yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif seperti Undang-Undang.

b. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Sutojo dan John (2015:5-6), *Good Corporate Governance* mempunyai lima macam tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melindungi hak dan kewajiban pemilik saham.

2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholders* dan non pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, dan
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

D. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan IAI pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini telah mengalami proses yang cukup lama kurang lebih empat tahun dari waktu penyusunannya, dimulai dengan disusunnya *Exposure Draft* (ED) yang diterbitkan sejak tahun 2008. Namun, saat ini tidak semua OPZ yang ada di Indonesia dapat menerapkan PSAK 109. Sebagian OPZ mengalami beberapa kendala

dalam penerapannya, salah satu faktor kendalanya adalah adanya kesulitan dalam sumber daya manusia yang dimiliki OPZ.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berisi tata cara penyusunan laporan keuangan yang selalu mengacu pada teori yang berlaku atau dengan kata lain didasarkan pada kondisi yang berlangsung. Sebagai suatu pedoman, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu kemutlakan bagi setiap perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Namun paling tidak dapat memastikan bahwa penempatan unsur-unsur atau elemen data ekonomi harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data ekonomi dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan dan mengevaluasi suatu laporan keuangan guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak.

Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK No. 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI (Washilah dan Nurhayati : 2013)

yaitu: 1) Fatwa MUI no. 8/2011 tentang amil zakat, 2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, 3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. 4) Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.

Apa saja jenis laporan keuangan yang harus disajikan, apa saja elemen atau isi laporan keuangan, bagaimana format pelaporannya, dan kebijakan akuntansi merupakan hal-hal yang diatur dalam standar akuntansi zakat. Berikut ini beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam PSAK No. 109 :

1. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.
2. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dalam lain yang oleh pemberi diperuntukan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
3. Dana infak/sedekah adalah bagian nominal atas penerimaan infak/sedekah.
4. Dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan zakat.
5. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
6. Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari; fakir, miskin, riqab, orang yang terlilit utang, muallaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan (*ibnu sabil*), dan Amil.

7. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.
8. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakat.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Menurut komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

1. Neraca (laporan posisi keuangan).
2. Laporan Perubahan Dana.
3. Laporan Perubahan aset Kelolaan.
4. Laporan Arus Kas, dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

E. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelola dana zakat, infak/sedekah. Sedangkan definisi Pengelola Zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, bahwa Pengelolaan zakat adalah

kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Widodo dan Teten, 2001).

Tugas utama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah untuk memungut dan mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat, kemudian menyimpannya di Badan Amil Zakat. setelah itu menyalurkannya ke masyarakat sesuai dengan ketentuan syara'. Dalam peraturan perundang-undang, diakui adanya dua jenis Organisasi Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat. Badan amil zakat dibentuk dan tersusun dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan. Badan Amil Zakat pada awalnya disebut dengan BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah). Pengertian BAZIS ditemukan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 tahun 1991/47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, infak dan sedekah. Dalam Pasal I Surat Keputusan Bersama (SKB) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan BAZIS adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infak/sedkah secara berdaya guna dan berhasil guna (Hasan, 2011).

OPZ merupakan istilah lain dari amil zakat. Bedanya, jika amil zakat dapat dibentuk oleh perorangan, OPZ dibentuk oleh sekelompok orang. Amil zakat adalah salah satu golongan dari tujuh golongan yang berhak menerima zakat. Menurut Hafidhuddin (2007: 48), amil zakat merupakan seseorang atau kelompok orang yang bertugas melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, pendistribusian, serta proses

pencatatan keluar masuknya dana zakat. Fatwa MUI nomor 9 Tahun 2011 mendefinisikan amil zakat adalah:

- a. Seseorang atau kelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau
- b. Seseorang atau kelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

F. Akuntansi Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang dikenakan atas harta yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk diserahkan kepada penerima-penerima tertentu melalui petugas tertentu. Zakat merupakan Rukun Islam yang ketiga wajib bagi setiap muslim seperti tercantum dalam surat At-Taubah: 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahuwa Ta’ala Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Departemen Agama RI, 2013)

Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran islam. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia. Dalam pernyataan PSAK No.109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki

sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan kesejahteraan masyarakat. Untuk Infaq dan shadaqah mempunyai pemahaman arti yang sedikit berbeda dengan zakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hafidhuddin (2007). Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, sedangkan shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Dalam terminologi syariah pengertian infaq dan sedekah berarti mengeluarkan sebagian harta/penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Hukum yang berlaku bagi infaq dan sedekah adalah sunnah, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang artinya :

“Dalam harta seseorang terdapat hak Allah dan Rasul-Nya disamping zakat.”. Infaq ada yang wajib maupun sunnah, infaq wajib diantaranya adalah zakat dan infaq sunnah adalah sedekah. Sedekah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima shadaqah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya (Mu'rs 2011).

PSAK No. 109, infaq/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Sedangkan, Jusuf (2001) menyatakan akuntansi sendiri dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu. Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi terutama yang bersifat finansial kepada

pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan (Soemarso, 2002).

Menurut Mursyidi (2002) Akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*meansurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam alokasi zakat.

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi tujuan akuntansi zakat menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standart for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah serta bagaimana penyalurannya.

G. Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, begitu pentingnya zakat sebab itu Allah SWT dalam Al-Qur'an menyebut kata zakat sebanyak 30 kali dan 27 kali diantaranya beriringan dengan kata shalat. Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting baik dalam konteks manusia dengan Allah, dengan dirinya, dengan masyarakat, dan dengan hartanya. Dalam hubungan manusia dengan Allah, zakat adalah salah satu kewajiban dari Allah SWT. Seperti dicantumkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat (43) sebagai berikut :

وَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. (Departemen Agama RI, 2013)

Ayat di atas menunjukkan bahwa menunaikan zakat adalah perkara yang sangat penting bagi umat Islam. Zakat termasuk kedalam salah satu rukun Islam, dengan membayar zakat berarti manusia telah menunaikan salah satu perintah Allah. Zakat menurut bahasa berarti berkah, bersih dan berkembang, disebut berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh karena karunia dan keberkahan yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang *Muzakki*. Disebut bersih, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertai yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya.

Disebut berkembang, karena dengan membayar zakat hartanya dapat mengembang dan tidak bertumpuk disuatu tempat atau pada seseorang.

Zakat menurut terminologi syari'ah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*) yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Zakat merupakan suatu media untuk menumbuhkan kesadaran didalam diri manusia bahwa harta benda yang mereka miliki bukanlah hak penuh mereka, tetapi harta yang mereka miliki merupakan amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada manusia untuk dikelola, untuk mengambil manfaat dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan Allah, sebagai pemilik yang sebenarnya.

Menurut Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Bandung dalam Aliyati(2015), pengertian zakat ditinjau dari segi etimologi adalah tumbuh, baik, berkah, suci, dan kelebihan, maksud dari kelima etimologi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Tumbuh** menunjukkan bahwa benda yang dikenakan zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan atau dengan campur tangan keduanya). Dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang sehingga menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (*Muzakki*) dan sipenerima (*Mustahiq*).

2. **Baik** menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya. Dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat serta akan meningkatkan kualitas *muzakki* dan *mustahiq*-nya.
3. **Berkah** menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (potensi). Potensial bagi perekonomian dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
4. **Suci** menunjukkan bahwa benda yang dikenakan zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram. Dan jika telah dizakati, ia dapat mensucikan mental *muzakki* dari akhlak buruk dan juga bagi *mustahiq*-nya.
5. **Kelebihan**, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok *muzakki*, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok *mustahiq*. Tidak bernilai ibadah apabila menimbulkan kesengsaraan bagi *muzakki*.

Sedangkan makna zakat menurut Undang-Undang No.23 tahun 2011 pasal I ayat II adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat islam. Pengertian diatas hampir sama dengan yang terdapat dalam PSAK 109 yang menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang diwajibkan dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Jika dirumuskan maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap orang muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-

syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah *nisbah, haul dan kadar*-nya (Ali,2006 : 39).

H. Infaq

Menurut bahasa, infaq adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminologiartinya mengeluarkan harta karena taat,patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada dirinya. Pengeluaran infaq dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaannya dan kehendak muslim tersebut Nurhayati dan Wasilah, (2013:285). Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 195 sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya :

“Dan tetaplh kamu berinfaq di jalan Allah, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”(Departemen Agama RI, 2013)

Infaq adalah menyumbangkan harta sebagai amalan sunat untuk kebajikan yang diperintahkan Allah SWT, disebut 73 kali dalam Al-Qur'an Parman, (2012:125).

Terdapat dua jenis infaq yang pertama, infaq wajib yang terdiri atas zakat dan nadzar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nadzar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang.Menurut

Qardhawi, Nadzar itu adalah sesuatu yang makruh. Namun apabila diucapkan, maka harus dilakukan sepanjang hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kedua, infaq sunnah yakni infaq yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridha Allah, biasa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya memberikan makanan bagi orang yang terkena bencana (Nurhayati dan Wasilah, 2013:285).

I. Sedekah

Sedekah dalam syariat Islam memiliki arti yang sama dengan infak, akan tetapi dalam hal cakupan berbeda, jika infak lebih mengarah kepada pengertian materil, sedangkan sedekah memiliki cakupan yang lebih luas menyangkut hal-hal yang bersifat materil dan imateril. Sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (Parman, 2012:125). Zakat, hibah, wakaf, nafkah kepada keluarga juga termasuk dalam infak. Zakat infak dan sedekah memang memiliki beragam pengertian, tergantung sudut pandang masing-masing pemerhati.

Sedekah adalah segala pemberian atau kegiatan untuk mengharapakan pahala dari Allah SWT. Sedekah memiliki dimensi yang lebih luas dari infaq, karena sedekah memiliki 3 pengertian utama:

1. Sedekah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al-Qur'an dan As-Sunah ada yang tertulis dengan sedekah padahal yang di maksud adalah zakat.
2. Sedekah adalah hal yang ma'ruf (benar dalam pandangan syariah).

Dari kedua pengertian di atas, maka sedekah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta tetapi jugadapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain Nurhayati dan Wasilah, (2009:285). Terdapat beberapa manfaat dari infaq dan sedekah antara lain:

- a. Mencegah datangnya bala (kesulitan).
- b. Memelihara harta dari hal-hal yang tidak diinginkan.
- c. Mengharap keberkahan yang dimiliki.

J. Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelolaan Zakat dalam Menerapkan Akuntansi Zakat PSAK 109

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia berupaya memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan sistem akuntansi yang baik dari suatu OPZ. Pada tahun 2010, IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. PSAK ini bertujuan untuk mengatur tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah yakni mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah yang berlaku bagi Organisasi Pengelola Zakat yang berkewajiban menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

PSAK diterbitkan sebagai pedoman standardisasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat. Dengan adanya standardisasi tersebut maka akan terjadi keseragaman (*uniformity*) dan keterbandingan (*comparability*) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang

dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia, hal ini juga dapat membantu memudahkan akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan OPZ.

Penerapan akuntansi zakat PSAK 109 dapat mengatasi permasalahan umum lembaga pengelolaan zakat yaitu masalah profesionalisme, dibutuhkan adanya penguatan dari sisi kelembagaan. Penguatan posisi lembaga zakat ini dapat diwujudkan diantaranya dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, sehingga BAZ atau LAZ sebagai lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah maupun yayasan, mampu melaksanakan tugasnya secara baik sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga yakni memaksimalkan potensi zakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan (Endriyana, 2016).

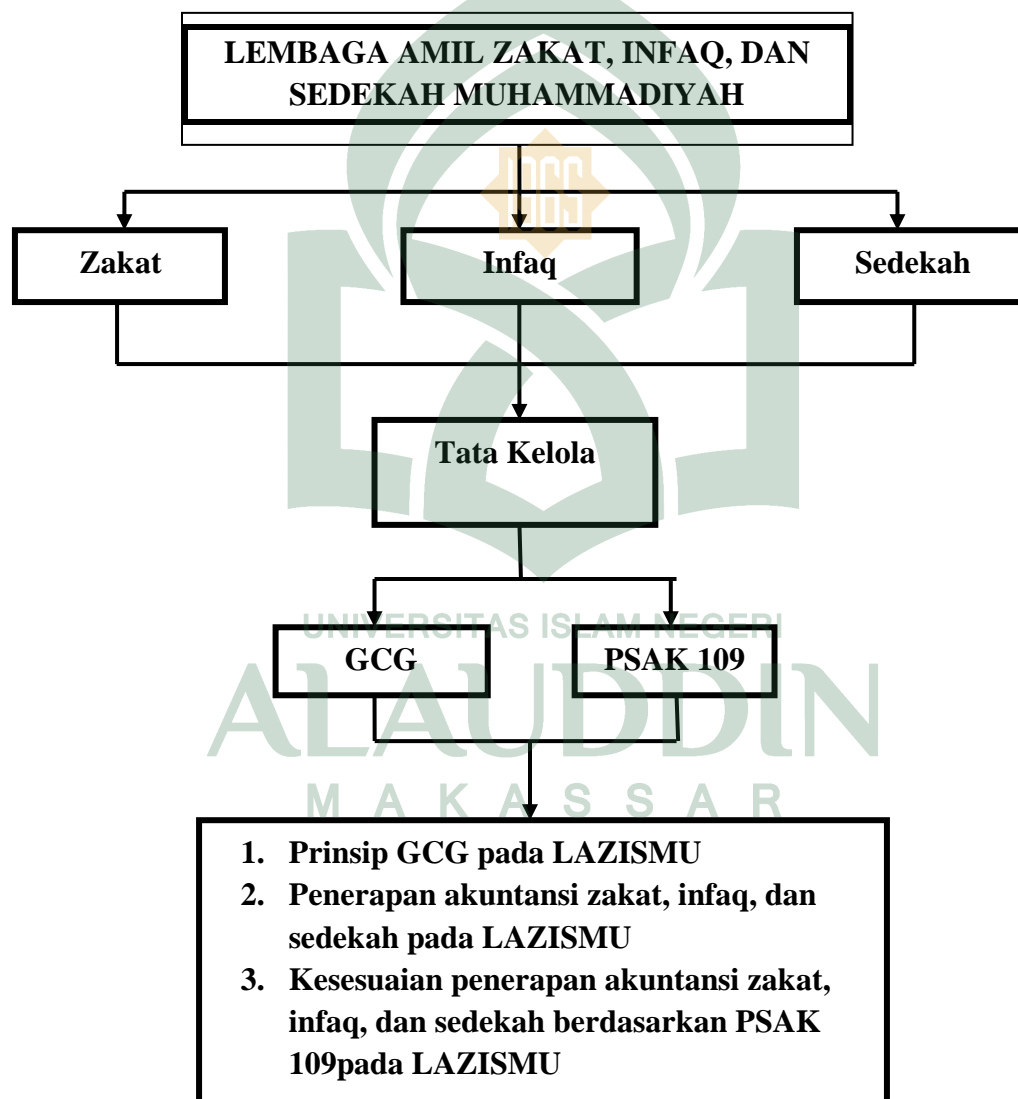
K. Kerangka Pikir

Tahap penerapan dari standar akuntansi zakat pada lembaga pengelola zakat memiliki banyak kendala yang dihadapi dalam pengimplementasiannya. Pelaporan keuangan bagi instansi pengelola zakat secara keseluruhan harus mengikuti standar akuntansi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 09. Pemahaman mengenai bagaimana kesesuaian penerapan standar akuntansi keuangan PSAK 109 pada laporan keuangan pada lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu di berbagai wilayah.

Kesesuaian penerapan standar akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada laporan keuangan LAZIS MU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah) Makassar, akan

dikaji dengan menggunakan *Shariah Enterprise Theory* dan *Stewardship Theory* sehingga diperlukan kerangka teoretis dalam pembahasan masalah diatas. Berdasarkan landasan teori yang akan diuraikan, maka kerangka konseptual penelitian disajikan pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti akan mengkaji bagaimana mengetahui prinsip GCG pada LAZIS MU, penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada LAZIS MU, serta mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah berdasarkan PSAK 109 pada LAZIS MU Makassar. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan mengamati mempelajari secara intensif tentang fenomena yang terjadi dalam lingkungan LAZIS MU. Dalam melakukan penelitian khususnya dalam pengumpulan informasi, peneliti berperan/berpartisipasi aktif dan secara penuh yang berhadapan langsung dengan para informan baik dari sumber informan dalam lingkungan LAZIS MU maupun dari luar lingkungan LAZIS MU.

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam (*verstehen*), penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peneliti harus dapat diterima oleh informan dan lingkungannya agar mampu mengungkap data yang tersembunyi melalui bahasa tutur, bahasa tubuh, perilaku maupun ungkapan-ungkapan yang berkembang dalam dunia dan lingkungan informan.

Penelitian kualitatif secara umum digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain sebagainya. Rahmat (2009) salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Penelitian kualitatif ini sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang atau fenomena yang diamati.

Pendekatan dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, *komprehensif*, dan *holistik*. Dengan mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan yang didapat setelah melakukan analisa terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian akan dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZISMU) di Kampus Unismuh, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar yang merupakan salah satu lembaga pengelolaan Zakat di Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu

dengan cukup mendalam dan menyeluruh. Menurut Rahardjo (2011:250) studi kasus untuk memahami individu yang dilakukan secara integratif dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik.

Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu (Rahmat, 2009). Disamping itu, studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang diteliti, tetapi juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang diperoleh dari responden berupa hasil wawancara dan data dokumenter. Wawancara dilakukan kepada Pengelola LAZISMU di Makassar yang memenuhi kriteria sebagai informan. Kriteria dari informan yaitu terdiri dari anggota Pengelola LAZISMU yang telah bekerja kurang lebih 3 tahun.

Selain itu sumber data pada penelitian ini merupakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) dan sesuai

dengan segala ketentuan (*informan*) yang telah ditentukan. Menurut Lofland dalam Moleong (2005) dalam Djaelani (2013) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden (Jogiyanto, 2013). Teknik ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung tentang keadaan serta praktik akuntansi yang diterapkan LAZISMU, adapun model wawacaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pegawai LAZISMU di Makassar. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dilakukan untuk mendapat informasi, keterangan, dan penjelasan mengenai permasalahan yang secara mendalam agar data yang diperoleh lebih akurat, lengkap, dan terpercaya karena diperoleh langsung oleh peneliti tanpa menggunakan perantara apapun.

2. Studi Pustaka

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dapat berupa buku, majalah, surat kabar, dan tulisan-tulisan ilmiah untuk mendapatkan kejelasan konsep.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data sekunder yang tersedia pada organisasi. Teknik dokumentasi berorientasi untuk mendapatkan data melalui dokumen-dokumen dan catatan tertulis berupa arsip yang terdapat dalam objek penelitian. Arsip dalam objek penelitian ini berupa laporan keuangan LAZISMU.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi obyek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, selanjutnya peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data.

Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan.

Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, untuk itu diperlukan adanya proses reduksi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dan berlangsung selama penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi dengan jelas akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Dalam reduksi data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama pada penelitian kualitatif adalah interpretasi atas problem penelitian. Oleh karena itu jika dalam penelitian peneliti menemukan segala sesuatu yang dianggap asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, maka hal demikianlah yang akan menjadi perhatian peneliti dalam mereduksi data.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan wawasan pikiran.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam hal ini digambarkan dengan sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk naratif. Dengan menyajikan data yang telah direduksi, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan program kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, dimana kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan saat mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah tetapi mungkin juga tidak karena dalam penelitian kualitatif rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten sehingga menjadi suatu data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan. Menurut Moleong (2008:327) agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan pengecekan data apakah data yang disajikan valid atau tidak, maka diperlukan teknik keabsahan/kevalidan data. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2013:330) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam triangulasi yaitu :

1. Triangulasi Teknik

Menurut Sugiyono (2013:330) triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

2. Triangulasi Sumber Data

Menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Triangulasi sumber data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang terkumpul untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data-data tersebut. Hal ini dapat berupa penggunaan sumber, metode penyidik dan teori yang saling berkaitan sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum objek penelitian

1. Latar Belakang Berdirinya Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Makassar

LAZISMU Makassar lahir dari beberapa latar belakang pemikiran, diantaranya:

- a. Al-Qur'an dan as-Sunnah menegaskan bahwa setiap muslim dan mu'min wajib berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan tenaga, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Warga Muhammadiyah yang sejak awal berkomitmen mendasarkan perjuangannya kepada al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbulah, sudah barang tentu mendukung sepenuhnya gerakan pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) secara kelembagaan.
- b. Gerakan pemberdayaan masyarakat yang diilhami Surah Al-Maa'un merupakan ikon gerakan Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan seabad yang lalu, harus terus digalakkan oleh segenap jajaran Persyarikatan, termasuk PDM Kota Makassar. Untuk menunjang keberlangsungan gerakan ini potensi keuangan persyarikatan harus terus digali dan diberdayakan untuk kepentingan umat. Salah satu potensi

keuangan persyarikatan yang sangat besar adalah Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).

- c. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat, yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, memberikan legalitas kepada Muhammadiyah untuk membentuk lembaga Amil Zakat sebagai wadah menghimpun dan memberdayakan ZIS warga Muhammadiyah khususnya, dan umat islam pada umumnya.
- d. Gerakan Dakwah Muhammadiyah memerlukan finansial yang tidak sedikit, sementara ZIS warga Muhammadiyah bila dikelola dengan sungguh-sungguh dan profesional merupakan kekuatan finansial “raksasa” yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan kaum dhu’afa, dan untuk menunjang gerakan dakwah Muhammadiyah melalui asnaf fi sabilillah, baik di tingkat Daerah, Cabang, Ranting, Amal Usaha, maupun Ortom.

2. Perkembangan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Makassar

Di kota Makassar, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) sebagai lembaga otonom, sudah sejak tahun 2003, namun hanya beroperasi di kalangan terbatas khususnya di Cabang Makassar dan Karunrung. Setelah Mukhtamar Muhammadiyah ke 45 di Malang bulan Juli 2005, struktur Pimpinan mengalami perkembangan, diantaranya Majelis Wakaf

dikembangkan menjadi majelis Wakaf dan ZIS, maka LAZISMU diintegrasikan ke dalam Majelis Wakaf dan ZIS dengan nama “Tim Pengelola Zakat Muhammadiyah”, yang dibentuk pada bulan September 2008. Tim ini telah melakukan kegiatan membentuk UPZ di Cabang-Cabang dan Amal Usaha Muhammadiyah, Mendata Muzakki, dan Mustahik, mengumpulkan dan mendistribusikan ZIS tahun 1429, 1430, dan 1431 H serta menyusun Pedoman Pengelolaan ZIS.

Pada Lokakarya Nasional Lembaga Pengelola ZIS Muhammadiyah yang berlangsung tanggal 28 Januari 2009 di Jakarta, disepakati bahwa semua lembaga pengelola ZIS di lingkungan Muhammadiyah harus terintegrasi dalam suatu payung hukum LAZISMU Pusat Jakarta, yang telah mendapatkan legalitas melalui SK Menteri Agama RI No. 457 tertanggal 21 November 2002, dengan sistem “JEJARING”. Dengan demikian semua lembaga ZIS di lingkungan Muhammadiyah menjadi jejaring LAZISMU Pusat Jakarta. Karena itu, Tim Pengelola Zakat Muhammadiyah Kota Makassar menyesuaikan diri menjadi “LAZISMU MAKASSAR JEJARING LAZISMU PUSAT JAKARTA”. Setelah melalui proses panjang, pada bulan Oktober 2010 LAZISMU Makassar memperoleh SERTIFIKAT JEJARING dari LAZISMU Pusat Jakarta, dengan nomor registrasi : 2601, tertanggal 2 Agustus 2011. Setelah Muktamar Muhammadiyah ke 46 di Yogyakarta, struktur pembantu pimpinan persyarikatan mengalami perkembangan kembali di Yogyakarta, struktur pembantu pimpinan persyarikatan mengalami perkembangan kembali

diantaranya Majelis Wakaf dan ZIS dipisahkan menjadi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan serta Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS). Sejak itu LAZISMU Makassar berdiri sendiri sebagai salah satu lembaga Pembantu Pimpinan yang setara dengan Majelis/Lembaga lainnya.

3. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Makassar

A. Keadaan Pengurus

Berdasarkan SK PDM Kota Makassar No. 007/KEP/III.0/D/2011 tertanggal 10 Jumadil Awwal 1432 H/14 April 2011, struktur organisasi pengurus LAZISMU adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. M. Nurdin Massi, M. Pd. I

Wakil Ketua : Ir. Muh. Ilyas Nurdin

Sekretaris : Awang Darmawan

Wakil Sekretaris : Muh. Ismail

Anggota : 1. Drs. Aminuddin Langke, M. Hum

2. Drs. Erman Nywitadi

3. Jamaluddin Sanre, S. Ag, M. Si

4. Syahrin Saputra

5. Muslimin

6. Syahid Munir Syahrir

Setelah kepengurusan berjalan kurang lebih satu tahun, beberapa orang pengurus tidak dapat menjalankan tugasnya, maka pada bulan juli 2012 diadakan penyegaran pengurus dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua	: Drs. M. Nurdin Massi, M. Pd. I
Wakil Ketua	: Ir. Muh. Ilyas Nurdin
Wakil Ketua	: Drs. Aminuddin Langke, M. Hum
Sekretaris	: Sulaiman, S.Ag
Wakil Sekretaris	: Awang Darmawan
Wakil Sekretaris	: Muh. Ismail
Bendahara	: Drs. Erman Nywitadi
Wakil Bendahara	: Jamaluddin Sanre, S. Ag, M. Si
Wakil Bendahara	: Drs. Abd. Rahman
Anggota	: 1. Syahrian Saputra
	2. Nur Syamsir
	3. Munir Abd. Rahman, S.Ag, S.Pd. I
	4. Muslimin
	5. Zainuddin
	6. Syahid Munir Sayahrir
	7. Ihrul Room Saputra

Keadaan yang sama kembali terjadi pada tahun 2014, sehingga dilakukan penyegaran kembali dengan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota

Makassar No. 013/KEP/III.0/D/2014 tanggal 8 Ramadhann 1435 H/5 Juli 2015 M,
dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua : Drs. M. Nurdin Massi, M. Pd. I
Wakil Ketua : Drs. Aminuddin Langke, M. Hum
Sekretaris : Drs. Kamaruddin Kasim
Wakil Sekretaris : Jamaluddin Sanre, S. Ag, M. Si
Bendahara : Drs. Erman Nywitadi
Wakil Bendahara : Jamaluddin Sanre, S. Ag, M. Si
Wakil Bendahara : Drs. Abd. Rahman
Anggota : 1. Ir. Ilyas Nurdin
2. Nur Syamsir
3. Munir Abd. Rahman, S.Ag, S.Pd. I
4. Hasanuddin A. Hasdir, A. Md
5. Ihrul Room Saputra

Badan Pelaksana : 1. Muh. Syahrian Saputra
2. Sulaiman, S. Ag

Kemudian untuk menyesuaikan dengan struktur LAZISNU pusat, pada pertengahan tahun 2015 kembali diadakan penyempurnaan pengurus, dengan SK PDM Kota Makassar 026/KEP/III.0/D/2015 tertanggal 5 sya'ban 1436/23 Mei 2015 M, dengan komposisi sebagai berikut:

WALI AMANAH : KH. Muchtar Waka, MA
: Prof. Dr. H. Ali Parman, MA

: H. Abd. Razak Muh. Tahir

DEWAN SYARI'AH : Drs. KH. Jalaluddin Sanusi

: Dr. H. Baharuddin Ali, M. Ag

: H. Sudirman, S. Ag

BADAN PENGAWAS : Drs. H. Mustamin Umar, MM

: H. Ali Akbar, S. Ag

: Drs. M. Sjukri Pasangki

BADAN PENGURUS

Ketua : Drs. M. Nurdin Massi, M. Pd. I

Wakil : Drs. Aminuddin Langke, M. Hum

Sekretaris : Drs. Kamaruddin Kasim

Wakil Sekretaris : Jamaluddin Sanre, S. Ag, M. Si

Bendahara : Drs. Erman Nywitadi

Wakil Bendahara : Drs. Abd. Rahman

Nur Syamsir

Muflih Mustamin

Munir Abd. Rahman, S.Ag, S.Pd. I

BADAN PELAKSANA :

Direktur : Muh. Syahrin Saputra

Direktur Pengumpulan : Muh. Ismail Idrus

Anggota : Fadli Suraim

Direktur Pendayagunaan : Nasrullah, SH

Direktur Keuangan : Drs. Abd. Rahman

Anggota : Ahmad Faruq Zainuddin

Direktur Administrasi : Amir Mahmud

Anggota : Muflih Mustamin

Pada uraian di atas terlihat bahwa LAZISMU melakukan penyegaran pengurus dalam periode ini sebanyak tiga kali. Ini semata-mata dilakukan untuk menjaga dinamisasi gerakan, dan juga menjadi pelajaran pada periode yang akan datang. Gerak persyarikatan tidak boleh hanya karena hambatan personil yang karena satu dan lain hal tidak dapat aktif. Personil Majelis/Lembaga sebaiknya dievaluasi setiap enam bulan atau setiap tahun.

4. Keadaan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Makassar

Tabel 4.1
Keadaan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

NO.	CABANG/AUM	NAMA UPZ	KET
1	Karunrung	H. Hamza Karim Muchdar Boli, S.Pd. I	Aktif
2	Biringkanaya	Ir. Syahrudin T, MM Drs. Paharuddin	Aktif
3	Sambung Jawa	Suwandi Hassake, S. Sos	Tidak Aktif
4	Manggala	Muh. Basyir Muh. Ali Rahimi	Tidak Aktif
5	Layang Parang Layang	Abd. Hafid Syam Syamsuddin	Aktif
6	Panakukang	Drs. Muh. Hatta Soreang. M	Aktif
7	Makassar	Fadli Suraim Muslimin	Aktif

8	Tallo	Drs. Amiluddin Muh. Sabri	Tidak Aktif
9	Maccini	Andi Hamjan, S.Pd, MM, M.Pd Sulaiman, S.Pd. I	Aktif
10	Bara-Barayya	Fahmi Jalaluddin, S. Hi M. Syawaluddin, A.Ma Kamaruddin Kanci, S.E	Aktif
11	Lariang Bangi	AR. Baso Abd. Rauf Lukman Hakim	Tidak Aktif
12	Pisang	Drs. Nurdin Sanra	Aktif
13	Mamajang/Maricaya	Drs. Ismail Tuwo Mahlil Mappe Zulfakar Daming	Tidak Aktif
14	Mariso	Ismail Ilyas Drs. Syukrin Umar	Tidak Aktif
15	Ujung Tanah	Marsali Abbas Ikhwan Muin, S.Pd Lukman Ismail, S.Pd	Aktif
16	Mimbar	M. Tajuddin, A. Ma	Aktif
17	Tello Baru	Drs. Amir Pattanri Drs. Haiyung B. Ali Drs. Uddin Taksan	Aktif
18	Bontoala	Syamsul Arief Sukriadi Rine Jumadi	Tidak Aktif
19	Jongaya		Tidak Aktif
20	RS St. Khadijah I	Drs. Burhanuddin	Aktif
21	SMP Muh. 1	Aminah, S.Pd	Aktif
22	SMK Muh. 2	Masri, S.Ag	Aktif

Sumber: Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Makassar.

Pada akhir periode ini sedang diupayakan pembentukan UPZ di perguruan tinggi (Unismu dan Akkes), pendidikan dasar dan menengah dan

masjid Muhammadiyah. Pada saat laporan ini ditulis, sudah disahkan UPZ Masjid Nurul Da'wah Mamajang.

5. Visi, Misi, Tujuan, Program Strategis dan Program Kerja Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Makassar

- a. Visi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Makassar
“Menjadi Lembaga ZIS Terpercaya”.
- b. Misi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Makassar
 - 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
 - 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
 - 3) Optimalisasi pelayanan muzakki/munfiq dan mustahik.
- c. Tujuan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Makassar
 - 1) Meningkatkan kesadaran warga Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya menunaikan ZIS secara bersama-sama (berjamaah).
 - 2) Terciptanya Kondisi yang memudahkan warga Muhammadiyah dan umat Islam menunaikan ZIS melalui LAZISMU.
 - 3) Tumbuhnya kepercayaan warga Muhammadiyah dan umat Islam kepada LAZISMU.
 - 4) Terkumpulnya ZIS dengan jumlah yang mencapai target yang ditentukan.

d. Program Strategis Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah

Muhammadiyah Makassar

- 1) Optimalisasi pengumpulan ZIS
- 2) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM)
- 3) Pengembangan Sumber Daya Insani (PSDI)
- 4) Pelayanan Sosial Masyarakat (Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO))

e. Program Kerja Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah

Makassar

1. Optimalisasi Pengumpulan ZIS

- a) Sosialisasi langsung ke cabang dan ranting serta amal usaha Muhammadiyah
- b) Sosialisasi melalui brosur, banner, spanduk, baliho, dll.
- c) Menjalin kemitraan dengan AUM dan lembaga lainnya
- d) Membuka rekening diberbagai bank syariah
- e) Membentuk tim jemput ZIS cepat
- f) Bekerja sama majalah khittah dan media lainnya dalam pelaporan ZIS
- g) Pendataan dan pemberian setifikat dan kartu donatur tetap
- h) Mengoptimalkan kinerja UPZ di cabang dan AUM

2. Pemberdayaan Ekonomi Du'afa

- a) Pemberian bantuan modal usaha mikro

- b) Pelatihan manajemen usaha
- c) Pendampingan
- 3. Pengembangan Sumber Daya Insani (PSDI)
 - a) Bantuan beasiswa cerdas
 - b) Bantuan guru honorer berprestasi
 - c) Pelatihan guru Muhammadiyah
- 4. Pengembangan Dakwah
 - a) Bantuan Sarana dan Prasarana Dakwah
 - b) Pembinaan da'i pencerah
 - c) Layanan pengajian
- 5. Pelayanan Sosial Masyarakat (Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO))
 - a) Bantuan sembako kepada fakir miskin
 - b) Siaga bencana
 - c) Bantuan pengobatan
 - d) Peduli muallaf

B. Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan sedekah LAZISMU Makassar

1. Penghimpunan Dana ZIS Pada LAZISMU Makassar

Penghimpunan dalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan. Menurut Huda (2013) penghimpunan dana (*fundraising*) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan

masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dana atau sumber dayanya kepada sebuah organisasi atau lembaga. Substansi *fundraising* berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur dan muzakki.

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari *fundraising* bagi sebuah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) yaitu pengumpulan dana, penambahan jumlah muzakki dan donatur, meningkatkan citra LAZIS dan menjaga loyalitas muzakki dan donatur. Pembayaran yang terjadi di masyarakat masih membayar zakat, infaq sedekah (ZIS) secara individu, atau secara langsung kepada mustahiq yang terdiri dari fakir miskin dilingkungannya. Selain itu, ada juga masyarakat yang membayarnya melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dana yang terkumpul bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran bagi masyarakat Islam khususnya. Keberhasilan pengumpulan dana ZIS tidak terlepas dari manajemen pengelolaannya untuk menunjang keberhasilan dalam pengumpulan dana. Sistem manajemen pengumpulan dana didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yang baik dengan administrasi yang teratur dan jelas.

Penghimpunan dana pada LAZIS MU Makassar baik itu dana Zakat, infaq, sedekah dan dana lainnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Para muzakki dapat menyalurkannya dengan mendatangi langsung LAZIS MU

terdekat, atau dengan layanan jemput zakat dimana pengurus lembaga pengelola zakat dapat menjemput langsung zakat dari muzakki baik atas permintaan muzakki yang bersangkutan maupun inisiatif amil sendiri, serta bisa mendonasikannya melalui transfer ke rekening Bank Bukopin Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Sejalan yang diungkapkan oleh Bapak Nurdin selaku ketua LAZISMU Makassar memaparkan bahwa:

“Metode pengumpulan zakat ada banyak, tapi kami di LAZISMU ini biasanya menyurati masjid-masjid untuk melakukan sosialisasi dan penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah. Pada akhir periode ini, kami sedang mengupayakan pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di perguruan tinggi (Unismuh dan Akkes), pendidikan dasar dan menengah serta masjid di Muhammadiyah. Tapi ada juga masyarakat yang tidak mau bersusah-susah, jadi tinggal transfer saja ke rekening LAZISMU”. (bapak Nurdin, 16/9/2019).

Pengumpulan zakat ini mampu memberikan hubungan antar Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah dengan muzakki salah satunya adalah dengan adanya akuntabilitas layanan dan akuntabilitas program. Akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan (Warno, 2016). Sejatinya, akuntabilitas program ini merupakan fenomena pertanggungjawaban Badan Amil Zakat khususnya LAZISMU Makassar kepada *mustahiq* dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi du'afa, pengembangan sumber daya, dakwah dan pelayanan sosial masyarakat. Sedangkan, bentuk akuntabilitas layanan yaitu dengan pengumpulan dana melalui layanan antar jemput zakat

muzakki, dapat dijadikan sbagai silaturahmi karyawan LAZISMU kepada muzakki untuk memberikan informasi mengenai program-program LAZISMU yang belum diketahui muzakki. Akuntabilitas layanan terwujud dalam pemberian layanan sesuai undang-undang yang berlaku untuk meningkatkan taraf hidup *mustahiq*.

Syariah Enterprise Theory memandang bahwa pengumpulan dana ZIS yang dilakukan tidak serta merta dilihat dari aspek fisiknya melainkan niat dalam hati, dan rasa ikhlas dalam memberikan pelayanan. *Syariah enterprise theory* mengandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, kepercayaan dan akuntabilitas. Sehingga sikap amanah dipupuk, dimana seorang muslim dituntut menyampaikan amanah kepada ahlinya. Sikap amanah, tidak hanya dimiliki dalam diri orang yang berzakat, tetapi juga pada para petugas di LAZISMU Makassar, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 30 yang berbunyi:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”. (Departemen Agama RI, 2013)

Ayat ini mengandung arti bahwa seorang orang harus memiliki sifat yang amanah dan adil dalam menyampaikan kebenaran. Amanah dianggap sebagai simbol bagaimana seseorang terhadap apa yang telah dipercayakan kepadanya.

Randa *dkk* (2011) menyatakan bahwa hal ini dilakukan sebagai sesuatu yang transenden sebagai hubungan pribadi antara Tuhan dengan manusia secara perorangan maupun dalam komunitas, sehingga individu atau komunitas dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai spiritual yang diyakininya. Memandang bahwa optimalisasi penghimpunan zakat akan bisa tercapai bila LAZISMU Makassar mampu menepis keraguan para muzakki, caranya adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangannya.

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Pada LAZISMU Makassar

Berdasarkan amanat UU 38 tahun 1999, bahwa dana zakat dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan besar, yakni kegiatan konsumtif dan produktif. Fadillah (2012) menyatakan bahwa kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan terdapat pada bidang kesehatan, pendidikan, bidang sosial kemasyarakatan, dan bidang sosial lainnya. Sementara kegiatan produktif adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha produktif yang bersifat jangka menengah-panjang

(Direktorat pemberdayaan zakat, 2015:11). Dana yang di salurkan untuk kegiatan produktif seperti pemberdayaan ekonomi rakyat melalui bantuan modal kerja UMKM, bantuan alat kerja, dan pembinaan usaha mikro/makro (Kurnia, 2008: 158).

Berkenaan dengan pendistribusian zakat, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan di klasifikasikan menjadi 8 asnaf yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, ibn sabil (Diretorat pemberdayaan zakat, 2007:14). Hal ini tertuang dalam Q.S At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Departemen Agama, RI : 2013)

Orang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya

masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Turunnya ayat tersebut, sasaran zakat menjadi jelas dan masing-masing mengetahui haknya. Dengan dijelaskannya lebih rinci oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang pendistribusian zakat, maka para petugas zakat, atau juga lembaga-lembaga pengelola zakat tidak dapat membagikan zakat sesuai dengan sekehendak hati mereka (Rahayu, 2014).

Hasil wawancara (Pak Nurdin), menyatakan bahwa:

“Kita mendistribusikan itu terprogram, terencana dan terarah. Zakat yang terkumpul didistribusikan kepada mustahik dengan persentasi 50% untuk fakir miskin, 15% untuk amil, dan 30% untuk Sabilillah (gerakan dan kegiatan Muhammadiyah)”. (Bapak Nurdin, 16/9/2019)

Atas dasar ini, LAZISMU Makassar tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain selain dari yang telah ditentukan (8

Asnaf). Disini terdapat nilai keadilan yang sama diantara semua golongan *mustahiq*. Maksud dari adil disini sebagaimana yang dikatakan Imam *Syafi'* adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing *mustahiq* dan juga kemaslahatan umat islam semampunya. Spirit ungkapan tersebut adalah bahwa setiap orang hendaknya selalu berusaha sekuat tenaga untuk tirakat mencari Tuhan karena hanya dengan terus mencari kehidupan manusia akan terus berjalan (Sartini, 2009). Semua itu didasari semangat ingin mendekatkan hubungan manusia dengan Tuhan sebagai cita-cita setiap orang untuk mencapai keimanan yang lebih kompleks.

Kebijakan distribusi zakat telah mengacu aspek legalitas *mustahiq*. Aspek penting yang perlu dipahami dan diperhatikan terkait dengan kebijakan distribusi zakat yaitu ketepatan dalam menentukan *mustahiq*, terutama dalam mendefinisikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai *mustahiq*. Perlu diperhatikan untuk mencapai ketepatan sasaran dan ketepatan penggunaan zakat. Hal ini tentunya bertujuan untuk menyelaraskan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat (Anwar, 2012). Diharapkan dapat digunakan untuk kegiatan yang produktif sehingga dapat menaikkan kesejahteraan masyarakat khususnya *mustahiq* secara umum.

Aturan syari'ah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah sepenuhnya adalah hak milik para *mustahiq*. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ad-Dzaariyat ayat 19 yang berbunyi:

ءَاخِذِينَ مَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya :

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian^[1417]”. (Departemen Agama RI, 2013)

Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta. Ayat tersebut menerangkan bahwa pada setiap harta seseorang itu ada fakir miskin, baik yang meminta-minta ataupun orang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu. Badan Amil Zakat tetap dituntut untuk memperhatikan hal demikian. Hal ini di pertegas pula pada Al-Qur'an Surah Al-An'aam ayat 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمْ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ﴿١٤١﴾

Terjemahnya :

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Departemen Agama RI, 2013)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang di dapatkan ada sebagian hak orang lain. Tentunya berkaitan erat dengan perintah untuk menunaikan zakat yakni

dengan menyalurkan zakat nya kepada yang berhak melalui lembaga baik itu Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat. Sebagaimana yang dipaparkan pula:

“Untuk meningkatkan zakat ini tentunya kita mengembangkan program-program seperti pemberdayaan Dhu’afaa, pengembangan sumber daya insani (SDI), pengembangan da’wah dan pelayanan sosial”. (Bapak Nurdin, 16/9/2019)

Dari hasil wawancara tersebut memberikan penjelasan bahwasanya pemberdayaan zakat melalui dana yang dihimpun merupakan bentuk tanggung jawab terbesar khususnya kepada Allah dan sesama. (Triyuwono 2006:207) Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Artinya bahwa pihak yang mendapat amanah yaitu pihak Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Namun, memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah (muzakki).

C. Analisis Akuntansi Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada LAZISMU Makassar

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan, penilaian harta dan pendapatan harta yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat islam. Akuntansi merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat dengan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga.

Sebagai lembaga pemegang amanah, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Makassar diharuskan untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat (Nainggolan, 2005:11). Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi, secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Dalam mengelola dana ZIS dari masyarakat tentunya membutuhkan pelaporan pertanggungjawaban. Tujuan utama akuntansi keuangan amil zakat adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang layak sebagai bahan informasi kepada pihak yang berkepentingan (Parmono, 2010).

Terkait dengan usaha transparansi dan pelaporan akuntabilitas amil sejatinya telah disusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan. Hal ini didasarkan pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sehingga standar akuntansi keuangan syariah ini murni disusun berdasarkan fatwa dan di terjemahkan menjadi standar pelaporan yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang kini masih dalam bentuk PSAK Nomor 109.

Terbitnya PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah diharapkan mampu mengatur sistem standarisasi organisasi pengelolaan zakat di Indonesia, baik berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporannya. Parmono (2010) menyatakan bahwa standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses

lembaga pengelolaan zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Senada dengan yang dipaparkan oleh Bapak Nurdin bahwasanya:

“Kalau kita disini sebisa mungkin melakukan pelaporan yang transparan, jadi misalkan ada pendistribusian dana kita panggil mereka untuk ikut melihat atau sebagai saksi. Jadi mereka juga tau kegiatan dan pendistribusian dananya kemana, itumi juga bentuk transparansi dan akuntabilitasnya kami”. (Bapak Nurdin, 16/9/2019)

LAZISMU Makassar wajib untuk melaporkan kinerja dan posisi keuangan serta laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah kepada para muzakki atau donatur. Dari pemaparan tersebut membuktikan bahwa LAZISMU Makassar terbuka melaporkan aktivitas-aktivitasnya.

Tugas pokok Lembaga Amil Zakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan yang sesuai dengan ketentuan agama, jadi peranan akuntansi bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum, khususnya pada para muzakki yang telah menyalurkan dananya dan percaya pada Lembaga Amil Zakat.

Proses penyusunan laporan keuangan LAZISMU Makassar tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti-bukti baik itu bukti penerimaan maupun pengeluaran untuk dicatat. Kendati demikian Lembaga Amil Zakat tidak melakukan penjurnalan, hanya melakukan beberapa pencatatan pembukuan dengan merincikannya sebagai akun penerimaan atau akun pengeluaran. Dimana dana yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat serta dana zakat yang disalurkan diakui sebagai

pengurang dana ZIS. Tujuannya untuk memudahkannya dalam mengetahui perubahan dana zakat dalam membuat laporan pertanggungjawaban, maka LAZISMU Makassar menggunakan buku kas untuk mencatat segala penerimaan dan pengeluarannya. Sebagaimana yang di paparkan oleh Bapak Nurdin bahwa:

"Kalau kita mendapatkan pemasukan dana, ya langsung dicatat sebagai bentuk penerimaan kas. Begitupun kalau kita ada pengeluaran, maka akan dicatat sebagai pengeluaran kas LAZISMU baik dalam bentuk kegiatan operasional atau pengeluaran untuk mustahiq". (Bapak Nurdin, 16/9/2019)

Pembukuan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat menggunakan sistem *single entry* memiliki kelebihan dan kelemahan yakni pencatatan ini di anggap mudah dan cukup sederhana serta mudah untuk dipahami, namun tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap serta sulit untuk menemukan kesalahan dalam pencatatan dan sulit untuk di kontrol.

Adanya tuntutan untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas menjadikan organisasi pengelola zakat membuat laporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Megawati dan Trisnawati, 2014). Tercermin dalam *Syariah Enterprise Theory* senantiasa berpegang teguh pada prinsip dan aturan Tuhan yakni selalu mengedepankan sifat-sifat keteladan baik dalam berbuat atau dalam melaksanakan amanah dari muzakki. Seperti halnya Lembaga Amil Zakat dengan prinsipnya menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dapat diandalkan, mudah dipahami dan relevan bagi para penggunanya, serta tetap dalam konteks syariah Islam (Rahman, 2015).

Ilustrasi pencatatan saat penerimaan kas (zakat) berdasarkan PSAK 109

Tabel 4.2: Jurnal penerimaan kas

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
31/10/17	Kas	Rp 150.000.000,-	
	Dana zakat		Rp. 150.000.000,-

Sumber: data tahun 2017 penerimaan saldo dari rekening LAZISMU

Pada Tabel 4.2 : menunjukkan bahwa penerimaan kas yang diterima oleh pihak LAZISMU Makassar, dilakukan pencatatan sebesar jumlah yang diterima dari muzakki dan di akui sebagai penambahan dana zakat dalam bentuk kas. Namun, dalam pencatatan dana zakat LAZISMU Makassar tidak melakukan penjurnalan-
penjurnalan atas transaksi yang telah terjadi.

Tabel 4.3: Jurnal pengeluaran dana zakat

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
31/10/17	Dana zakat	Rp. 35.700.000,-	
	Kas		Rp. 35.700.000,-

Sumber : data primer 2017

Tabel 4.3 : menunjukan bahwa dana zakat yang di salurkan oleh pihak LAZISMU Makassar pencatatannya sama dengan saat pencatatan penerimaan kas, yakni melakukan pencatatan sebagai pengeluaran kas tanpa melakukan penjurnalan.

Lembaga Amil ZAKat dalam melakukan pencatatan penerimaan kas dan pengeluaran kas sejatinya tidak melakukan pencatatan sesuai dengan PSAK 109 : paragraf 17 dan 29 menyatakan bahwa:

“Zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas”.

Adapun cara menghitung perubahan kas pada LAZISMU Makassar :

Perubahan kas = Pemasukan - Pengeluaran

Pihak LAZISMU Makassar menggunakan bentuk pencatatan tersebut untuk mengetahui total penerimaan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah serta mencerminkan jumlah kas yang riil dan objektif. Dengan alasan bahwa nantinya akan mengacu sesuai PSAK 109, sebagaimana yang dipaparkan oleh Pak Nurdin, yaitu :

“LAZISMU Makassar dalam pengelolaan mengikuti sistem terpadu yang dikeluarkan oleh Lembaga Amil Zakat Pusat, yang nantinya akan disamakan dengan sistem akuntansi yaitu 109, namun untuk saat ini LAZISMU Makassar masih menggunakan sistem manual sambil menunggu panduan yang dikeluarkan oleh LAZISMU pusat yang akan menjadi panduan seluruh Indonesia”. (Bapak Nurdin, 16/9/2019)

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak LAZISMU Makassar belum mengacu pada standar akuntansi zakat yaitu PSAK 109. Pada dasarnya prinsip yang dilakukan hanya sebatas pemahaman pencatatan keuangan dengan cara pihak luar bisa lebih cepat mengerti apa maksud dan tujuan yang ingin/telah di capainya. Namun demikian Triuwono (2000:230) menyatakan bahwa akuntansi yang diselenggarakan oleh suatu badan/lembaga adalah untuk menghasilkan laporan yang bersifat keuangan yang akurat dan *accountable* untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Hal tersebut juga didukung oleh teori *stewardship* yang menjelaskan bahwa manajer organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah dalam mengimplementasikan akuntansi zakat tidak berdasarkan kemauannya sendiri. Pemerintah selaku pemberi ijin operasional membutuhkan laporan keuangan zakat, sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan dan pembinaanya.

1. Pengakuan dan Pengukuran

PSAK 109 menyebutkan bahwa pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Sedangkan pengukuran adalah proses penentuan untuk mengakui dan memasukan setiap elemen kedalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui jasa bank dan bagian akuntansi melakukan penjurnalan berdasarkan bukti transaksi dan membuat buku besar. Sedangkan menurut Suwardojo (2008) dalam Roziq dan Widya (2015) menyatakan bahwa pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah (kos) ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan tereflesi dalam laporan keuangan. Jadi pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat (dijurnal) atau tidak. Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan statemen keuangan.

Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah (kos) yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi. Pengungkapan berkaitan dengan cara pemberan atau menjelaskan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statemen keuangan utama (Roziq dan Widya, 2015). Penyajian adalah menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Termasuk dalam pengertian

pengungkapan ini adalah masalah penentuan masuk tidaknya informasi yang bersifat kualitatif ke dalam seperangkat statement keuangan.

Pengakuan dana zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan di akui pada saat menerima dan mengeluarkan kas dan di ukur sesuai dengan jumlah yang di terima. Untuk pembayaran dengan metode transfer oleh muzakki di akui pada saat Badan Amil Zakat menerima rekening koran dari bank-bank yang telah di tentukan, dan di akui sesuai dengan jumlah yang di setor muzakki. Sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh muzakki dengan cara mendatangi kantor Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan di akui pada saat kas di terima dan di kur dengan jumlah yang di berikan oleh muzakki.

Pengukuran zakat, infaq dan sedekah yang telah di lakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan pelaksanaannya sudah baik karna tidak lagi menerima aset nokas, dengan kata lain pengukuran di lakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar yang sejatinya telah di atur dalam PSAK 109.

Pengakuan dana zakat, infaq, dan sedekah di pandang sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh Badan Amil Zakat Provinsi Selatan dimana di dalamnya perlu di dasari oleh prinsip amanah yakni menjaga apa yang di amanahkan oleh pihak muzakki. Hal ini sesuai pula dengan *Syariah Enterprise Theory* memandang bahwa amanah merupakan bentuk tanggung jawab tertinggi yang wajib untuk di laksanakan karna bukan saja melibatkan manusia melainkan sang maha kuasa.

Tabel 4.4

Hasil penelitian perbandingan pengakuan dan pengukuran pada pengelolaan akuntansi zakat di LAZISMU Makassar

NO	Pengakuan dan pengukuran		Keterangan
	PSAK 109	LAZISMU Makassar	
1.	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.	Mengakui dana zakat dari muzakki pada saat menerima dan mengeluarkan kas.	Sudah sesuai dengan PSAK 109
2.	Penyaluran zakat kepada <i>mustahiq</i> diakui sebagai pengurang dan zakat sebesar: a) Jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas; b) Jumlah tercatat jika dalam bentuk aset.	Dana Zakat Infaq dan Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dan Zakat Infaq dan Sedekah dan dana ZIS yang keluar diakui sebagai pengurang kas.	Sesuai dengan PSAK 109
3.	Di ukur melalui satuan uang dengan menggunakan harga pasar dengan metode penentuan nilai wajar.	Dana zakat, infaq, dan sedekah pada LAZISMU Makassar dan hanya menerima aset kas	Sesuai dengan PSAK 109

Sumber : data primer 2017

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa Badan LAZISMU Makassar dalam mengakui dan mengukur dana zakat, infaq dan sedekah telah mengacu pada standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 109.

1. Pengungkapan dan penyajian

Undang–Undang No. 23 tahun 2011 pasal 29 menyebutkan bahwa setiap Lembaga Amil Zakat/Organisasi Pengelola Zakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat dan infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya secara berkala. Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban Lembaga

Amil Zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode. Pengungkapan dalam laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, Lembaga Amil Zakat dituntut harus menyajikan informasi yang jelas, lengkap dan secara tepat mengenai kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan Lembaga Amil Zakat.

Pengungkapan yang dilakukan oleh LAZISMU Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Namun demikian telah merincikan dana yang diterima seperti penerimaan dana dari berbagai pihak yang dikirim melalui bank-bank yang telah ditentukan.

Tabel 4.5
Laporan dana LAZISMU Makassar

No	Nama Bank	Penempatan Penerimaan Zakat		
		Rek. Zakat	Rek. Operasional	Deposito *)
		(A)	(B)	(C)
1	Bank Syariah Mandiri Giro : 700 239 9158	32.077.238	0	0
2	Bank Syariah Mandiri Giro : 708 657 6036	10.826.355	0	0
3	Bank Bukopin Giro : 770 600 3968	1.608.590	0	0
	Bank Bukopin	1.289.320		0

4	Giro : 770 600 3976		0	
	Jumlah	45.801.504	0	0

Sumber : Laporan LAZISMU Makassar, 2017

Laporan dana tersebut sebagai penerimaan dana non halal yang pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal di akui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah dan di ungkapakan dalam laporan keuangan.

Dalam penyajiannya Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan belum menggunakan PSAK 109. Hal ini tercermin pada laporan keuangan hanya terdapat laporan operasional dan laporan dana. Selain itu pula, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan juga menyajikan laporan penerimaan dan penyalurannya yaitu dengan cara memasang baliho-baliho maupun spanduk sebagai bentuk transparansinya.



Tabel 4.6
Hasil penelitian perbandingan pengungkapan dan penyajian pada pengelolaan akuntansi zakat di LAZISMU Makassar

No	Pengungkapan dan Penyajian		Keterangan
	PSAK 109	LAZISMU Makassar	

1.	Amil menyajikan dana Zakat Infaq dan Sedekahserta dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.	Meyediakan laporan keuangannya dalam bentuk laporan keuangan operasional laporan dana.	Belum sesuai dengan PSAK 109
2.	Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.	LAZISMU Makassar belum mengelompokkan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Dan tidak terdapat bagian atas dana amil atau nihil.	Belum sesuai PSAK 109

Sumber : data di olah peneliti (2017)

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa LAZISMU Makassar dalam mengungkapkan dana zakat, infaq dan sedekah tidak mengacu pada standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 109, dalam artian belum ada kesesuaian yang dilakukan.

D. Prinsip Good Corporate Governance pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah Makassar

Good corporate governance atau tata kelola zakat yang baik sangat diperlukan disetiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Menurut Rahman (2015) karakteristik *good coporate governance* diantaranya adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengeloan zakat yang termasuk di dalamnya pengelolaan infak/sedekah. Akuntabilitas dan transparansi suatu OPZ dapat diwujudkan melalui sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar. Untuk menghasilkan

sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar, maka segala aktivitas pembukuan dan penyusunan laporan keuangan harus mengacu pada suatu pedoman atau standar yang telah ditetapkan. Standar yang dimaksud adalah PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 ini digunakan sebagai acuan bagi setiap OPZ dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan setiap transaksi zakat dan infak/sedekah serta menjadi acuan dalam pembuatan laporan keuangan OPZ.

Pertama melihat dari aspek *Transparency*, LAZISMU sangatlah terbuka dalam hal apapun mulai dari program-programnya maupun pelaporan keuangannya. Dari segi pelaporan biasanya LAZISMU melaporkan setiap laporan bulannya melalui majalah suara Muhammadiyah serta *website* dari LAZISMU itu sendiri. Mereka selalu *update* setiap harinya baik itu terkait penghimpunan dana maupun penyaluran dananya.

Kedua yaitu aspek *Accountability*, dalam hal ini pihak LAZISMU juga telah menerapkan prinsip ini dengan baik. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari adanya SOP atau Kerangka Acuan Kerja pada setiap staf pada LAZISMU yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu semua staf yang ada pada LAZISMU itu telah kompeten bekerja pada bidangnya masing-masing. Dalam sisi laporan keuangan pihak LAZISMU juga telah menggunakan atau menerapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sebagai acuan untuk pelaporan keuangan mereka, tetapi hampir sama dengan lembaga amil zakat lainnya yang pengelolaan organisasinya terpusat maka, pada LAZISMU Makassar hanya

memiliki laporan terkait penghimpunan serta penyaluran dana zakatnya saja dan penyajiannya juga hanya berupa Neraca. Jadi untuk laporan keuangan pada LAZISMU Makassar bisa dikatakan belum sesuai dengan PSAK 109 karena dalam PSAK 109 telah disebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap yaitu terdiri dari, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Ketiga yaitu *Responsibility*, tanggungjawab dari LAZISMU bisa dilihat dari mereka yang selalu berusaha memuaskan masyarakat baik *muzzaki* ataupun *mustahiq* mereka dengan cara berbagai kemudahan dalam bertransaksi yang mereka berikan, program-program yang mereka miliki serta selalu terbuka dalam hal apapun. Selain itu juga mereka selalu menjaga nama baik para *muzzaki* atau donatur mereka dengan tidak mempublikasikan nama atau identitas donatur yang tidak ingin identitasnya dipublikasikan. Dalam segi tanggungjawab kepada organisasi mereka selalu berusaha meningkatkan target penghimpunan dana zakat mereka setiap tahunnya dan juga selalu melaporkan setiap hasil kinerja untuk setiap bulannya kepada LAZISMU pusat.

Keempat yaitu *Indepent*, sama seperti Organisasi Pengelola Zakat lainnya LAZISMU juga merupakan Organisasi Pengelola Zakat yang sifatnya *Independent*, bebas dari pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip mereka serta tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

Terakhir yaitu *Fairness*, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak masyarakat baik itu *muzzaki* maupun *mustahiq* dapat ditunjukkan dengan adanya

layanan kemudahan dalam pembayaran zakat yang pihak Rumah Zakat berikan. Melalui media *online* masyarakat dapat membayar zakat dengan cara transfer pada rekening-rekening yang telah Rumah Zakat sediakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

LAZISMU Makassar sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan infak/sedekah. Penghimpunan zakat dan infak/sedekah dilakukan dengan dua cara yaitu penyetoran langsung oleh muzakki dan penyetoran yang melalui perantara UPZ.

Proses penyusunan laporan keuangan di LAZISMU Makassar tidak melakukan penjurnalan, hanya melakukan beberapa pencatatan pembukuan dengan rincikannya sebagai akun penerimaan atau akun pengeluaran. Pembukuan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat menggunakan sistem *single entry* memiliki kelebihan dan kelemahan yakni pencatatan ini dianggap mudah dan cukup sederhana serta mudah untuk dipahami, namun tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap serta sulit menemukan kesalahan dalam pencatatan dan sulit untuk dikontrol.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di LAZISMU Makassar telah memenuhi kelima prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik.

B. Saran dan Implikasi Penelitian

Adapun saran dan implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. LAZISMU Makassar sebaiknya menerapkan perlakuan akuntansi zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan PSAK 109 sehingga laporan keuangannya dapat tersaji dengan tepat. Sehingga muzakki tidak lagi merasa khawatir untuk mengeluarkan hartanya dan menyalurkan kepada lembaga-lembaga zakat lainnya terutama kepada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bagi pemerintah pusat diharapkan nantinya dapat membuat atau memberikan ranking bagi seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada dan juga menyusun peraturan terkait penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara lebih jelas, sehingga bagi OPZ yang mendapat ranking paling tinggi dapat menjaga kinerja agar tetap baik, sedangkan bagi OPZ yang berada di ranking bawah dapat meningkatkan kinerjanya dengan mencontoh OPZ lain yang kinerjanya telah sesuai dan menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al-Karim, RI Departemen Agama, Jakarta : 2013
- Achmad, Mas Daniri. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Ali, Mohammad Daud. 2007. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aliyati, Rafiqah. 2015. Penerapan Zakat Sebagai Pengaruh Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Anggraeni, Rulian NA Dan L. Lubis D. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Memilih Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor. *Jurnal AL-Muzara'ah*. 3(1).
- Anwar, Achmad Syaiful Hidayat. 2012. Model Tata Kelola Badan dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Badan/Lembaga Amil Zakat di Kota Malang). *Jurnal Humanity*. 7(2) : 1-13.
- Badan Amil Zakat. 2017. *Outlook Zakat Indonesia 2018*. Jakarta: Pusat Kajian Strategi BAZNAS.
- Cahyadi, Adi. Hafazatul Amwal: Tokoh dan Karakter Akuntan Rasulullah. *Akuntabilitas*. 7(2): 109-121.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2007. *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*. Jakarta.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015. *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*. Jakarta.
- Djaelani, Aunu Rofiq. 2013. Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*. 20(1) : 82-92.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. Stewardship Theory Or Agency Theory: CEO Governance And Shareholder Returns. *Australian Journal Of Management*. 16: 49-64.

- Endriyana. 2016. Penerapan *Prinsip Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan Zakat. *Jurnal Akuntansi*.
- Fadillah, Sri., Nurleli, Rini Lestari, dan Helliana. 2012. Membangun Kepercayaan Konsumen: Faktor Penting pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*. 3(1) : 127-137.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hanifa, Roszaini dan Ram Al Jaffri Saad. 2014. Determinants of Zakah (Islamic Tax) Compliance Behavior. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. 5(2): 182-193.
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Huda, Nurul dan Tjiptohadi Sawarjuwono. 2013. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi *Action Research*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 4(3) : 330-507.
- Istutik. 2013. Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK: 109) pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Akrual*. 2(1): 19-24.
- Jusuf, Al Haryono. 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. Yogyakarta. Cet. Ke-7 Jilid 1.
- Kholifah, Siti. 2014. Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK 109 Mengenai Penyajian Laporan Dana ZIS (Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Kurnia, Hikmat dan Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta : Quantum Media.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Nainggolan, Pahala. 2005. *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nuhayati, Sri dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Edisi 2.

- Parisi, Salman A. 2017. Tingkat Efisiensi Dan Produktivitas Lembaga Zakat Di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 7(1): 63-72.
- Parmono, Agung. 2010. Perlakuan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat. *Artikel*. 1-20.
- Pujianto dan Asrori. 2015. Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/ Sedekah di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*. 4(1): 1-9.
- Puspitasari, Yulifa dan Habiburrochman, 2013. Penerapan PSAK No. 109 Atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 4 (3): 479-494.
- Rahardjo, Susilo & Gudnanto. 2011. *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*. Nora Media Enterprise, Kudus.
- Rahayu, Nurul Widyawati Islami. 2014. Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan Good Governance di Jember. *Karsa*. 22(2) : 1-17.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*. 5(9): 1-8.
- Rahman, Taufikur. 2015. Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah (PSAK:109) Upaya Peningkatan Transaparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat OPZ). *Jurnal Muqtasid*. 6(1) : 141-164.
- Randa, Fransisus., Iwan Triyuwono, Unti Ludigdo, Eko Ganis Sukoharsono. 2011. Studi Etnografi : Akuntabilitas Spiritual pada Organisasi Gereja Katolikyang Terinkulturasi Budaya Lokal. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 2(1) : 1-185.
- Rina, Indrayani, Isna Yuningsih dan Salmah Pattisahusiwa. 2013. Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Di Samarinda. *Publikasi Ilmiah*. 1(1).
- Ristifani. 2009. Analisis Implementsi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*Jurnal Akuntansi*.
- Salle, Ilham Z. 2015. Akuntabilitas Manuntungi: Memaknai Nilai Kalambusang pada Lembaga Amil Zakat Kawasan Adat Ammatoa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 6 (1): 28-37.

- Sartini, Ni Wayan. 2009. Menggali Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa Lewat Ungkapan (Bebasan, Saloka, dan Paribasa). *Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*. 5(1) : 28-37.
- Shahnaz, Sabrina. 2016. Penerapan Psak No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 16(1): 449- 458.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. CV ALFABETA. Bandung.
- Sumadi, 2017. Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Pemerataan Ekonomi Di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo). *Jurnal Ilmial Ekonomi Islam*. 3(1): 1-11.
- Sutojo, Siswanto dan E.John Aldridge. 2015. *Good Corporate Governance : Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*. Jakarta : Damar Media Pustaka.
- Soemarso. 2002. *Akuntansi Satu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat. Buku 2. Edisi Lima.
- Triyuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta: LkiS.
- Triyuwono, Iwan. 2006. Akuntansi Syari'ah : Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo-Gusti. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Akuntansi Syari'ah di Gedung PPI Universitas Brawijaya 2 September 2006*.
- Triyuwono, Iwan. 2012. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syari'ah*. Edisi Kedua. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Utomo, Setiawan.B, 2012. Akuntansi Zakat Sebuah Keharusan. *Majalah Akuntan Indonesia*.
- Wahyuni, Mirasanti. 2013. Penerapan Akuntansi Islam dan Pelaporan *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah. *Prestasi*. 11A(1A): 1411-1497.
- Waliyyani, Ghaniyyu Mintotik dan Amir Mahmud. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*. 4(2): 1-8.
- Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat. Cet. Ke-1.

L

A

M

P

I

R

A

N



Nomor : 014. BP/III.17/B/2019
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,

**Dekan Fakultas Agama Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

Di Makassar

Assalaamu 'Alaikum Waramatullah Wabarakaatuh.

Ba'dassalam, semoga Bapak tetap dalam keadaan sehat *walafiat* dalam lindungan dan rahmat Allah SWT dalam melaksanakan pengabdian kita sehari-hari. *Amien Ya Rabbal Alamien.*

Sehubungan dengan surat bapak dengan Nomor : 2572/EB.I/PP.00/07/2019, Tanggal 22 Juli 2019 tentang Permohonan izin Penelitian saudara :

Nama Mahasiswi : **ADITYA CHANDRA MEINALDY**
Nomor Pokok : **10800113054**
Jurusan : **Akuntansi**
Pekerjaan : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa**
Judul : **"Analiis Implementasi GCC dan Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, infaq dan Sadaqah pada Kasus Lazismu (lembaga Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) Makassar"**

Selanjutnya kami bersedia menerima Mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan Penelitian di Lazismu Makassar dengan meyerahkan Draft Peneliatian kepada kami.

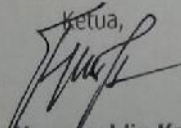
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa melapangkan dan memberkati rezeki kita.

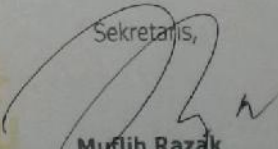
Wassalaamu 'Alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh.

Makassar, 13 Agustus 2019

ALA UDDIN
M A K A S S A R

PENGURUS LAZISMU MAKASSAR

Ketua,

Drs. Kamaruddin Kasim
NBM. 494 514

Sekretaris,

Muflih Razak
NBM. 846 943



RIWAYAT HIDUP



Aditya Chandra Meinaldy dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 20 Mei 1995. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, buah hati dari Ibunda DR. Ir. Kasifah, M,Sc dan Ayahanda Ir. Raden Sri Handoyo Muertedjo. Penulis memulai Pendidikan di TK Minasa Upa 2000-2001, setelah lulus TK Minasa Upa penulis melanjutkan Pendidikan di SD Minasa Upa pada tahun 2001-2007. Setelah lulus SD Minasa Upa penulis melanjutkan Pendidikan di Pesantren Sultan Hasanuddin pada tahun 2007-2010. Pada tahun tersebut juga penulis melanjutkan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Makassar hingga tahun 2013. Kemudian setelah tamat dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Makassar, penulis melanjutkan Pendidikan di salah satu Universitas Islam Negeri pada tahun 2013 yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi dan menyelesaikan studi pada tahun 2020. Selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar penulis bergabung dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Dalam organisasi tersebut penulis menjabat sebagai Pimpinan Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2015-2016 dan Pimpinan Cabang Divisi Ekonomi dan Bisnis Kreatif Tahun 2016-2017.

M A K A S S A R